

ANALISIS RUU TENTANG APBN

No. 10/an.PKA/APBN/IX/2020

**Ketenagakerjaan Indonesia:
Menghadapi Pandemi,
Menjelang Bonus Demografi**

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketenagakerjaan Indonesia: Menghadapi Pandemi, Menjelang Bonus Demografi

Executive Summary

Indonesia berada diambang bonus demografi, namun di tengah kondisi pandemi ini justru memperparah kondisi ketenagakerjaan yang sudah hadir sejak lama. Sebelum pandemi kualitas tenaga kerja Indonesia dapat dibilang lemah karena dari jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 yang mencapai 137,91 juta orang, jumlah penduduk yang bekerja hanya sebanyak 131,03 juta orang. Struktur angkatan kerja tersebut masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah (SD ke bawah) yang menyebabkan *value*/nilai mereka di mata industri pun lemah. Selain itu, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020 meskipun menurun dari periode sebelumnya yaitu mencapai 6,88 juta orang, namun dari jumlah pengangguran tersebut, lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) justru menyumbang angka pengangguran terbesar yakni 8,49 persen, disusul lulusan SMA sebesar 6,77 persen, diploma 6,76 persen, universitas/ perguruan tinggi sebesar 5,73 persen, SMP sebesar 5,02 persen, dan SD 2,98 persen. Kemudian ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi dan *physical distancing* menjadi upaya pencegahan penularannya, dunia usaha mengalami guncangan berat yang mengakibatkan sebanyak 2.146.667 pekerja terdampak Covid-19 dengan rincian: 383.645 pekerja di-PHK; 1.132.117 pekerja dirumahkan; dan 630.905 pekerja informal kehilangan pekerjaan/bangkrut. Sementara itu, hingga 22 April 2020 34.179 calon pekerja migran Indonesia gagal berangkat dan 465 peserta pemagangan dipulangkan.

Pemerintah dalam menyikapi hal ini, berupaya agar kondisi ekonomi rakyat tidak terpuruk dengan memberikan kebijakan tahun 2020 berupa: 1) stimulus ekonomi bagi pelaku usaha terutama bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK bagi karyawannya untuk mencegah meluasnya PHK dan; 2) program yang meringankan 56 juta pekerja sektor formal diantaranya insentif pajak, relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan relaksasi pembayaran pinjaman/kredit; 3) jaring pengaman sosial pekerja sektor informal berupa bantuan sosial bagi pekerja informal yang masuk kategori miskin dan rentan miskin; 4) prioritas Kartu Pra Kerja bagi korban PHK; 5) masifkasi program padat karya tunai melalui program-program kementerian seperti Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian BUMN dan kementerian lainnya; dan 6) perlindungan bagi pekerja migran baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri melalui program seperti pengiriman paket sembako bagi pekerja migran di Malaysia. Kebijakan tersebut masih menjadi langkah utama di tahun 2021.

Demi menyongsong bonus demografi dan pemulihan ekonomi ke depan pemerintah perlu juga melakukan pemetaan di beberapa aspek ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran atas kondisi ketenagakerjaan yang baru pasca pandemi Covid-19. Pemetaan tersebut antara lain: pemetaan industri dan tenaga kerja yang terdampak Covid-19; pemetaan jenis pekerjaan yang hilang dan baru muncul akibat dinamika yang terjadi selama pandemi; pemetaan peluang digitalisasi usaha untuk perluasan kesempatan kerja; pemetaan sektor industri prioritas pasca Covid-19. Selain pemetaan untuk perencanaan ketenagakerjaan ke depan, dengan adanya peluang digitalisasi di dalam pelatihan vokasi sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil dalam waktu singkat dan masif jika dimanfaatkan dengan baik dan benar. Tentunya pelaksanaan pemetaan dan pelatihan vokasi di atas memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Koordinasi antar kementerian lembaga menjadi penting dalam memastikan bahwa tenaga kerja yang hadir saat ini merupakan tenaga kerja yang berkualitas terampil dan kompeten.

Ketenagakerjaan Indonesia: Menghadapi Pandemi, Menjelang Bonus Demografi

oleh

Marihot Nasution¹

Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Sementara itu, kondisi pandemi Covid-19 menjadi pukulan bagi pembangunan ketenagakerjaan Indonesia. Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional Keputusan Presiden (Keppres) No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, pemerintah secara bertahap meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan *physical distancing*, karantina wilayah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah. Berlakunya kebijakan tersebut berdampak terhadap sektor ekonomi khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per 31 Juli 2020 mencatat sebanyak 2.146.667 pekerja terdampak Covid-19 dimana 383.645 pekerja di-PHK; 1.132.117 pekerja dirumahkan; dan 630.905 pekerja informal kehilangan pekerjaan/bangkrut. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mengkalibrasi kembali kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menyusun rencana baru untuk mengatasi kemunduran akibat pandemi. Untuk itu, melalui tulisan ini, perlu diidentifikasi apa saja problematika ketenagakerjaan Indonesia sebelum dan saat pandemi ini dan apa kebijakan pemerintah dalam pemulihan kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi dan apa langkah yang diperlukan untuk kembali “on track” dalam pemanfaatan bonus demografi yang optimal nantinya.

Bonus Demografi: Penyumbang Tenaga Kerja bagi Indonesia

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa bonus demografi merupakan rasio ketergantungan usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) pada usia produktif (15-64 tahun) semakin kecil. Indonesia diproyeksikan akan menerima bonus demografi pada 2020-2030 (UN *World Population Prospects*, 2002). Seperti dilansir dari Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, Indonesia mengalami perubahan struktur penduduk yang cukup cepat. Saat ini, *Total Fertility Rate* (TFR) atau tingkat kelahiran adalah sebesar 2,28 dengan variasi yang cukup tinggi antarprovinsi. Di Indonesia, penduduk usia muda bergerak menuju puncaknya pada 2030-an. Pada periode tersebut, proporsi penduduk usia muda di Indonesia akan jauh lebih tinggi dari rata-rata negara Asia Tenggara. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 282 juta jiwa. Penduduk Indonesia pada 2045 diperkirakan berkisar antara 311 hingga 318,9 juta jiwa.

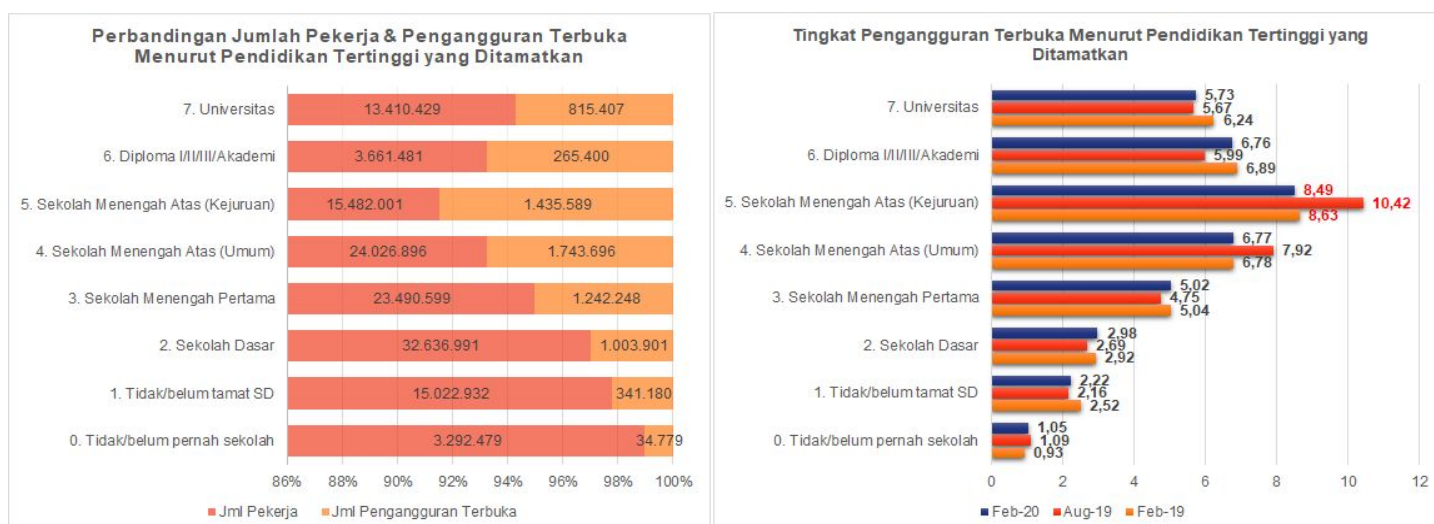
Dalam waktu 30 tahun terjadi perubahan struktur penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) dari sebesar 22,99 juta jiwa pada 2015 diproyeksikan menjadi 63,31 juta jiwa pada 2045. Setelah 2045, Indonesia akan memasuki era *ageing population* seperti Jepang. Perubahan struktur penduduk di Indonesia membawa penduduk Indonesia dengan jumlah usia produktif yang paling besar di wilayah Asia Tenggara. Penduduk usia produktif tersebut selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui produksi, juga melalui investasi yang dilakukan semasa usia produktif. Namun, perlu dijaga pertumbuhan penduduk yang seimbang agar tidak terjadi

¹ Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI; email: marihot.nasution@dpr.go.id

pertumbuhan ekonomi ke arah negatif. Kebijakan kependudukan harus dapat menopang keseimbangan fiskal dalam jangka panjang. Jumlah anak yang terus menyusut membuat rasio dukungan anggaran negara juga ikut menurun. Posisi tersebut bisa terjadi setelah 2030.

Meskipun demikian, permasalahan yang hadir di lapangan adalah rendahnya kualitas dari angkatan kerja yang dimiliki Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2020 memperlihatkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 137,91 juta orang, bertambah sekitar 4,35 juta orang (3,26 persen) dibanding Agustus 2019 sebesar 133,56 juta orang dan bertambah 1,73 juta orang (1,27 persen) dibanding Februari 2019 sebesar 136,18 juta orang. Dari total angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebesar 131,03 juta orang, bertambah sekitar 4,52 juta orang (3,57 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019 (126,51 juta orang). Struktur angkatan kerja tersebut masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah (SD ke bawah; Gambar 1) yang menyebabkan *value*/nilai mereka di mata industri pun lemah. Hal ini berdampak pada penghasilan yang diterima masyarakat tersebut rendah dan jika mereka kehilangan pekerjaan maka akan sulit mendapatkan pekerjaan kembali. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang, berkurang sekitar 170 ribu orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2019 (7,05 juta orang). Dari jumlah pengangguran tersebut, lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) justru menyumbang angka pengangguran terbesar yakni 8,49 persen, disusul lulusan SMA sebesar 6,77 persen, diploma 6,76 persen, universitas/perguruan tinggi sebesar 5,73 persen, SMP sebesar 5,02 persen, dan SD 2,98 persen (Gambar 1). Kondisi tersebut berulang dari tahun sebelumnya bahkan cenderung naik untuk pengangguran dengan pendidikan tertinggi SMA/SMK ke atas. Data ini menunjukkan mayoritas pengangguran Indonesia merupakan pengangguran usia muda dan terdidik. Hal ini menjadi hal yang perlu direnungkan karena pendidikan Indonesia belum sepenuhnya mampu mencetak lulusan yang mudah diserap lapangan kerja yang ada.

Gambar 1. Kondisi Angkatan Kerja Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Periode 2019-2020

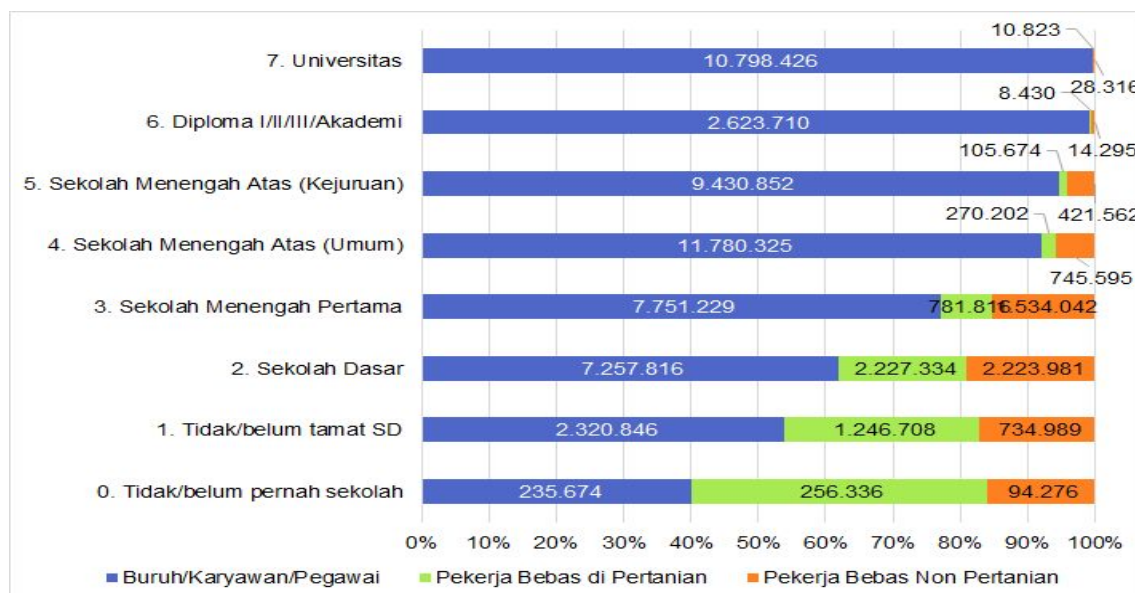


Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2019-2020, data diolah

Sementara itu, kondisi pekerja Indonesia saat ini menggambarkan lebih dari 30 juta lulusan SMA dan lebih dari 10 juta lulusan perguruan tinggi mengisi pasar tenaga kerja. Sesuai data BPS, jumlah pekerja di Februari 2020 adalah sebanyak 62.902.717 pekerja. Pekerja terdiri atas buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di nonpertanian yang jumlahnya secara berturut-turut 52.198.878 jiwa; 4.906.783 jiwa; 5.797.056 jiwa. Sebanyak 10,70 juta dari penduduk yang bekerja merupakan pekerja bebas, baik di sektor pertanian maupun non pertanian. Artinya mereka tidak memiliki jaminan kesehatan maupun jaminan kerja

karena pekerjaan mereka tidak didasarkan pada perjanjian kerja. Dari 52.198.878 pekerja kebanyakan merupakan lulusan SMA dan perguruan tinggi (Gambar 2).

Gambar 2. Pekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan & Status Pekerjaan Utama Februari 2020



Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2020, data diolah

Dari data yang disampaikan di atas, terlihat bahwa tenaga kerja Indonesia mendominasi sektor informal dalam menopang hidup mereka. Dari 126.515.119 angkatan kerja, yang bekerja di sektor formal hanya sebanyak 51.654.993 pekerja (Statistik Indonesia, 2020). Sektor informal ini memiliki kekurangan sarana dan prasarana pelatihan, baik untuk angkatan kerja baru, maupun tenaga kerja aktif. Dengan demikian, pekerja didalamnya kesulitan melakukan *up-skilling dan re-skilling* dalam rangka meningkatkan produktivitas. Indonesia tercatat memiliki tingkat produktivitas pekerja yang masih rendah dalam lingkup regional Asia. Posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Singapura. Hal ini dijelaskan dalam laporan APO (*Asian Productivity Organization*) *Productivity Databook* 2019. APO sendiri adalah suatu organisasi antar pemerintahan regional Asia-Pasifik, berdiri tahun 1961. Dalam perhitungan tingkat produktivitas tiap pekerja (berdasarkan nominal gaji pekerja per tahun 2017 dalam USD), Indonesia berada di posisi 13 dengan level produktivitas 21 persen atau senilai USD26 ribu, sekitar Rp364,7 juta (asumsi kurs Rp14.027). Posisi ini masih kalah dari Malaysia yang ada di posisi 8 dengan persentase 49 persen atau senilai USD60 ribu. Posisi pertama adalah Singapura dengan level produktivitas sebesar 115 persen atau senilai USD143.3 ribu. Hong Kong berada di posisi ke-2 dengan persentase 94 persen atau senilai USD116 ribu, Republik Rakyat Tiongkok sebesar 81 persen atau senilai USD99,7 ribu dan Jepang 64 persen atau senilai USD79,7 ribu. Adapun Sri Lanka menduduki posisi 9 dengan persentase 25 persen atau senilai USD31,2 ribu serta Mongolia di posisi 10 dengan persentase 23 persen atau senilai USD28,3 ribu.

Selain lemahnya produktivitas, pekerja informal juga memiliki kesejahteraan yang relatif rendah dibanding pekerja formal. Berdasarkan data BPS dalam Statistik Indonesia 2020, dinyatakan bahwa rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal tertinggi adalah sebesar Rp4.463.388, sementara untuk pekerja informal hanya sekitar Rp3.515.184. Data tersebut merupakan data upah/gaji di wilayah DKI Jakarta, di daerah lain memiliki angka yang lebih rendah. Selain tingkat kesejahteraan yang rendah pekerja informal ini juga tidak tercover dalam jaminan sosial. Hal ini terbukti dari pemaparan BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek per Juli 2020

bahwa dari total tenaga kerja Indonesia, hanya 92,45 juta pekerja yang *eligible* menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek. Namun hingga periode tersebut hanya 49,73 juta pekerja atau 53,79 persen yang telah menjadi peserta lembaga jaminan sosial tersebut (Raker Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, 26 Agustus 2020). Hal ini menambah dinamika ketenagakerjaan Indonesia.

Ketenagakerjaan di Masa Pandemi Covid-19

Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional Keppres No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, pemerintah secara bertahap meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan *physical distancing*, karantina wilayah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah. Berlakunya kebijakan tersebut berdampak terhadap sektor ekonomi khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid 19 terhadap ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan survei online. Survei dilakukan selama periode 24 April sampai 2 Mei 2020 terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, dengan jumlah responden yang terjaring sebanyak 2.160 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Gambar 3. Hasil Survey Dampak Covid-19 bagi Kegiatan Usaha



Sumber: Ngadi, 2020, data diolah

Dampak pandemi Covid 19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pengusaha, pandemi Covid 19 menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei mencatat 39,4 persen usaha terhenti, dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5 persen yang tidak terdampak (Gambar 3). Kemampuan bertahan oleh di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41 persen pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulan. Artinya pada bulan Agustus usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24 persen pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11 persen mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan, dan 24 persen mampu bertahan lebih dari 12 bulan. Sementara dampak Covid-19 pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40 persen usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52 persen mengalami penurunan kegiatan produksi. Hal ini berdampak 35 persen usaha mandiri tanpa pendapatan dan 28 persen pendapatan menurun hingga 50 persen.

Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan

40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Lebih lanjut, kelompok usia yang rentan terkena PHK adalah usia muda 15-29 tahun. Angkatan kerja muda memang cenderung akan tetap sehat dan tidak menderita gejala meskipun mereka terinfeksi COVID-19, namun mereka menghadapi risiko ekstrim kehilangan peluang untuk pengembangan mata pencaharian masa depan akibat mobilitas sosial-ekonomi yang dibatasi. Selain itu, kurangnya pengalaman dan keterampilan serta sedikitnya jaringan sosial menjadi faktor tingginya angka PHK di kelompok ini. Mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal dengan upah rendah, jam kerja tidak teratur, sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang buruk, serta rumitnya akses terhadap jaminan sosial. BPS mencatat bahwa pekerja usia 15 tahun ke atas di sektor informal mendominasi pekerja di Indonesia dengan jumlah 70,49 juta jiwa (55,7 persen), sementara pekerja di sektor formal hanya 56,01 juta pekerja.

Covid-19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja “serabutan” yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55 persen pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan, dan 38 persen order berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58 persen pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama masa pandemi Covid-19 dan 28 persen pendapatan berkurang sampai 30 persen.

Sementara itu, survei terhadap pekerja menunjukkan lapangan pekerjaan yang paling terdampak PHK adalah sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi dengan persentase 24 persen diikuti jasa kemasyarakatan sebesar 1 persen. Berdasarkan jenis pekerjaannya, sebanyak 32 persen korban PHK berasal dari tenaga usaha jasa; 22 persen tenaga profesional/teknisi; 15 persen tenaga tata usaha; 13 persen tenaga produksi operator alat angkutan dan pekerja kasar; dan 9 persen tenaga usaha penjualan. Sedangkan dari tingkat pendidikannya, 52 persen merupakan lulusan SLTA/ sederajat, 30 persen tamat perguruan tinggi setingkat sarjana, dan 11 persen lulusan diploma. Responden yang mengalami PHK sendiri didominasi oleh laki-laki sebanyak 61,3 persen. Dari segi pendapatan, 43 persen masih memiliki pendapatan tetap. Namun 20 persen responden mengalami pengurangan pendapatan sampai 30 persen, 16 persen tidak ada pendapatan, 10 persen pendapatannya berkurang sampai 50 persen, dan 11 persen berkurang 30 sampai 50 persen. Terkait sumber pendapatan, sebanyak 68 persen responden mengandalkan pendapatan dari pekerjaan saat ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hanya dua persen yang menjadikan bantuan pemerintah sebagai sumber pendapatan utama.

Kemenaker sendiri telah melakukan pendataan pekerja terdampak pandemi, baik pada pekerja formal maupun informal. Pengumpulan data dilakukan oleh Disnaker di seluruh Indonesia, K/L terkait, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Dari pendataan tersebut diketahui bahwa setidaknya 2.146.667 pekerja terdampak Covid-19. Pendataan hingga 31 Juli 2020 menandakan 383.645 pekerja di-PHK; 1.132.117 pekerja dirumahkan; dan 630.905 pekerja informal kehilangan pekerjaan/bangkrut. Sementara itu, hingga 22 April 2020 34.179 calon pekerja migran Indonesia gagal berangkat dan 465 peserta pemagangan dipulangkan.

Lebih lanjut, dari hasil survei tersebut dapat diprediksi 10 juta pengusaha mandiri akan berhenti bekerja dan 10 juta lainnya pendapatan menurun lebih dari 40 persen. Sebanyak 15 juta pekerja bebas atau pekerja keluarga akan menganggur. Dalam dua hingga tiga bulan ke depan, pengangguran bertambah 25 juta orang, terdiri dari 10 juta pekerja mandiri dan 15 juta pekerja bebas. Angka kemiskinan akibat adanya penurunan upah dan tanpa pendapatan diperkirakan akan mencapai 17,5 juta rumah tangga dengan asumsi Garis Kemiskinan adalah Rp440 ribu per kapita per bulan.

Dampak lain dari pandemi ini adalah otomatisasi. Pandemi Covid-19 telah mempercepat penetrasi teknologi digital di Indonesia. Penggunaan teknologi menjadi pilihan praktis korporasi untuk mencegah kebangkrutan. ILO menyatakan bahwa risiko otomatisasi akan menggerus para angkatan kerja muda karena pekerjaan mereka

cenderung lebih mudah untuk diotomatisasikan. Adanya Covid-19 diperkirakan mempercepat otomatisasi dalam proses produksi dan digitalisasi dalam proses transaksi pembayaran pada kegiatan perdagangan.

Intervensi Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah Demi Bonus Demografi Bermanfaat

Kinerja ekonomi yang positif hingga tahun 2019 memang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2016-Februari 2020 telah mengalami penurunan yakni dari 6,18 persen di Agustus 2015 menjadi 4,99 persen di Februari. Dari periode 2016 hingga Agustus 2019, lapangan kerja yang tercipta semakin besar yaitu dari 114,8 juta orang menjadi 126,5 juta orang atau tumbuh 10,2 persen (11,7 juta lapangan kerja baru tercipta). Meskipun dengan tren positif, permasalahan ketenagakerjaan masih terasa klasik, diantaranya **rendahnya produktivitas, kurang fleksibelnya pasar kerja, dan ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri**. Rendahnya produktivitas tenaga kerja diindikasikan oleh sektor informal yang masih mendominasi, yakni mencapai 55,72 persen dari total tenaga kerja yang tersedia. Sektor informal tersebut umumnya merupakan sektor yang belum terjangkau sepenuhnya oleh pengawasan dan regulasi pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong perluasan dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan porsi sektor formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Gambar 4. Perkiraan Bappenas Terhadap Pengangguran Tahun 2021 Pasca Pandemi Covid-19



Sumber: Sakernas Periode Agustus

Catatan: Sakernas Februari 2020 menyebutkan bahwa telah tercipta 1,66 juta lapangan kerja, sehingga TPT menjadi 4,99%.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Selain itu, tren positif kinerja ketenagakerjaan ini diperkirakan terhenti karena merebaknya pandemi Covid-19 di akhir kuartal pertama tahun 2020. Diperkirakan pandemi Covid-19 ini dapat meningkatkan jumlah penganggur akibat penambahan lapangan kerja sangat terbatas bahkan cenderung menyusut. Tahun 2020 jumlah penganggur akan bertambah sebanyak 4,0- 5,5 juta orang dibandingkan tahun 2019 dan mencapai 10,7-12,7 juta orang di tahun 2021 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Menghadapi hal tersebut, diperlukan strategi baru dalam bidang ketenagakerjaan agar pemanfaatan bonus demografi menjadi optimal dan angka pengangguran dapat ditekan dengan pengaruh pandemi yang minimal.

Semasa pandemi ini, presiden memberikan arahan dalam mitigasi pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan, diantaranya melalui: 1) stimulus ekonomi bagi pelaku usaha terutama bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK bagi karyawannya untuk mencegah meluasnya PHK dan; 2) program yang meringankan 56 juta

pekerja sektor formal diantaranya insentif pajak, relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan relaksasi pembayaran pinjaman/kredit; 3) jaring pengaman sosial pekerja sektor informal berupa bantuan sosial bagi pekerja informal yang masuk kategori miskin dan rentan miskin; 4) prioritas Kartu Pra Kerja bagi korban PHK; 5) masififikasi program padat karya tunai melalui program-program kementerian seperti Kemendes, Kemen PUPR, Kemen BUMN dan kementerian lainnya; dan 6) perlindungan bagi pekerja migran baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri melalui program seperti pengiriman paket sembako bagi pekerja migran di Malaysia. Pemerintah juga memberikan stimulus berupa subsidi upah kepada para pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya di bawah Rp5 juta. Subsidi upah tersebut diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan per dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta. Dengan adanya stimulus seperti ini, diharapkan daya beli masyarakat meningkat sehingga akan berdampak pada pertumbuhan positif perekonomian Indonesia pada kuartal III dan IV.

Dari keenam kebijakan mitigasi Covid-19 tersebut, didominasi oleh kebijakan bagi pekerja dan berfokus pada pemulihan ekonomi agar kesejahteraan rakyat terjaga. Sehingga kebijakannya merupakan kebijakan yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang dari sisi konsumsi masyarakat. Meskipun demikian, banyak pihak yang masih mengeluhkan kebijakan tersebut karena tidak berpihak pada beberapa kalangan masyarakat. Kartu Pra Kerja² misalnya, program ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2019 dengan memberikan insentif kepada pengangguran dan pelatihan bersertifikat secara gratis. Beberapa pihak mengeluhkan biaya yang dialokasikan dalam program ini yang terbilang besar, yaitu Rp 5,6 triliun atau 25 persen dari Rp20 triliun yang dianggarkan untuk program tersebut. Selain itu, banyak pelatihan serupa ditemukan di internet dengan mudah dan gratis. Sementara itu, program pelatihan dilakukan secara daring/*online* maka dirasa sulit untuk mengevaluasi peningkatan *skill* dan kompetensi peserta. Selain itu korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa *cash transfer* atau bantuan langsung tunai (BLT) dibandingkan dengan pelatihan *online*. Misi terpuji Kartu Pra Kerja dalam meningkatkan jumlah angkatan kerja terampil perlu diteruskan, namun tidak semua pelatihan dapat dilakukan secara *online* sepenuhnya. Saat ini Kartu Pra Kerja memang program yang lebih bersifat bantuan sosial daripada program pelatihan murni, namun kedepannya program ini perlu juga mengedepankan pelatihan seperti yang direncanakan sebelum pandemi. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan yang diperlukan di pasar tenaga kerja terbaru dan jika memungkinkan tidak hanya mengandalkan media virtual sebagai media penyampaian pelatihan. Mengingat pelatihan *online* hanya mampu menyalurkan pengetahuan namun untuk menjadi tenaga kerja terampil, angkatan kerja Indonesia juga perlu menguasai perilaku kerja yang hanya bisa diperoleh melalui pelatihan luar jaringan dengan praktek keahlian yang diperlukan. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan balai latihan kerja (BLK) yang juga dikembangkan oleh pemerintah.

Sementara itu, untuk tahun 2021 pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2021 menetapkan kebijakan tema kebijakan fiskal adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Penguatan reformasi akan diarahkan pada penguatan reformasi struktural untuk membangun pondasi yang kuat untuk pemulihan ekonomi

² Kartu Pra Kerja merupakan program pemerintah yang ditargetkan agar 5,6 juta peserta bisa menerima manfaatnya hingga akhir tahun 2020 dengan anggaran Rp20 triliun. Pada tiga gelombang yang sudah berjalan, tercatat sudah ada sekitar 680.000 peserta yang menerima manfaat Kartu Pra Kerja, 143.000 diantaranya merupakan usulan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Rinciannya, 168.111 peserta gelombang I, 288.154 peserta gelombang II, dan 224.615 peserta gelombang III. Pada gelombang 4 kali ini, kuota yang disediakan adalah 800.000 peserta. Sementara itu, besaran nilai insentif yang akan diberikan kepada para peserta adalah Rp 3,55 juta. Dana insentif tersebut terdiri dari voucher Rp1 juta untuk pelatihan yang ditawarkan oleh mitra Kartu Pra Kerja. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp2,4 juta yang masing-masing besarnya Rp600.000 per bulan. Peserta juga akan mendapatkan insentif dari pengisian survei sebesar Rp150.000 untuk tiga kali survei.

dan untuk menghindari *middle income trap*. Reformasi struktural juga dibutuhkan untuk perbaikan kualitas SDM dan peningkatan produktivitas melalui salah satunya reformasi bidang pendidikan, pelatihan vokasi, penelitian, reformasi bidang kesehatan, dan reformasi perlindungan sosial.

Pendekatan pembangunan SDM ini dilakukan dengan menyusun kebijakan yang integratif antara bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pada bidang pendidikan dan vokasi antara lain dilakukan dengan peningkatan kemampuan adaptif dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi, penempatan kepala sekolah dan guru terbaik dan berprestasi pada daerah tertentu untuk bertindak sebagai motivator dan agen perubahan, dukungan pembangunan prasarana pendidikan seperti rehabilitasi ruang kelas, memperkuat pendidikan vokasi dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*), sinergi antar program (BOS, PKH, PIP, KIP Kuliah, dan DPPN) untuk mencapai *sustainable education*. Pada bidang kesehatan antara lain penguatan sistem kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, serta menyempurnakan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Pada bidang perlindungan sosial, antara lain dilakukan melalui penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, pengintegrasian berbagai program perlindungan sosial dalam satu sumber data terpadu (DTKS), dan mendorong pemanfaatan program perlindungan sosial berbasis siklus hidup danantisipasi *aging population*.

Kebijakan ketenagakerjaan sangat bergantung pada input tenaga kerja itu sendiri, dimana permasalahannya sangat didominasi pada **ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri**. Kondisi ini diharapkan untuk terselesaikan dengan kebijakan pendidikan pada umumnya dan pendidikan vokasi pada khususnya. Dalam kebijakan anggaran pendidikan RAPBN 2021, pemerintah menitikberatkan pada penguatan program vokasi dan Kartu Pra Kerja, penguatan pelatihan yang bersifat *crash program* untuk menjaga keberlanjutan pendapatan di masa pemulihan sosial ekonomi, peningkatan *link and match* dengan industri, serta penguatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan adopsi TIK untuk menjembatani ketidaksesuaian skill *output* pendidikan dan industri. Meskipun demikian, di tahun 2021, Program Kartu Pra Kerja masih menjadi program prioritas pemerintah terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dalam RAPBN Tahun 2021 alokasi anggaran program Kartu Pra Kerja direncanakan sebesar Rp10,0 triliun, dalam mendukung upaya peningkatan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 diperlukan kemampuan siswa dalam penguasaan teknologi untuk menjawab kebutuhan masa depan yang semakin beragam. Dengan diterapkannya kebijakan ini, pendidikan vokasi di Indonesia diharapkan mampu menyiapkan SDM Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut. Pada tahun 2021 akan dilakukan beberapa kegiatan terkait dengan pendidikan vokasi yaitu: pengembangan *link and match* antara unit pendidikan dengan industri, revitalisasi 268 sekolah SMK dan 8 perguruan tinggi vokasi, dan pengembangan 1.000 BLK Komunitas.

Namun demi pemanfaatan tenaga kerja yang optimal, pemerintah perlu melakukan beberapa strategi dalam menghadapi dinamika pasca pandemi Covid-19 saat ini. Pelaksanaan pendidikan vokasi dan Kartu Pra Kerja dan reformasi yang dilakukan menjelang 2021 nanti sebaiknya juga disertai dengan pemetaan dunia usaha. Pemetaan ini diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan ke depan mampu menjawab masalah ketenagakerjaan dan menjadi dasar pemanfaatan bonus demografi yang optimal. Pemetaan yang dilakukan antara lain:

1. pemetaan industri dan tenaga kerja yang terdampak Covid-19, hal ini dapat memberikan gambaran atas industri mana saja yang jatuh dan bangkit di masa pandemi, pemetaan tenaga kerja terdampak dapat memberikan gambaran profesi mana saja yang dapat bertahan di saat ini. Dengan kedua pemetaan ini pemerintah dapat memberikan bantuan sosial bagi tenaga kerja yang terdampak dan memberikan

- insentif bagi industri yang tetap bertahan. Selain itu, hasil pemetaan dapat memberikan celah bagi peluang *reskilling & upskilling* tenaga kerja yang terdampak tersebut;
2. pemetaan jenis pekerjaan yang hilang dan baru muncul akibat dinamika yang terjadi selama pandemi. Hasil pemetaan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan karir dan pelatihan atas *skill* bagi profesi yang masih bertahan dan diperlukan nantinya;
 3. pemetaan peluang digitalisasi usaha untuk perluasan kesempatan kerja mengingat dengan adanya kebijakan *physical distancing* yang masih berjalan hingga kini, adanya digitalisasi di berbagai lini kehidupan merupakan solusi yang memudahkan pekerjaan.
 4. pemetaan sektor industri prioritas pasca Covid-19. Hal ini perlu dilakukan mengingat beberapa industri yang sebelumnya ditetapkan sebagai industri prioritas saat ini menjadi tidak relevan lagi dan tidak ada jaminan bahwa industri tersebut akan tetap bertahan dan menjadi prioritas selama pandemi masih ada dan vaksin belum tersedia seperti sektor jasa pariwisata, sektor jasa penerbangan dan sebagainya. Hal ini dapat juga menjadi dasar dalam perencanaan ketenagakerjaan ke depan agar tenaga kerja yang tidak terserap lapangan kerja makin berkurang.

Selain pemetaan untuk perencanaan ketenagakerjaan ke depan, dengan adanya digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, peluang hadirnya pelatihan vokasi secara digital juga terbuka agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil dalam waktu singkat dan masif. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah, namun juga perlu ditekankan kualitas pelatihan vokasi tersebut, sehingga apa yang dikeluhkan dalam program Kartu Pra Kerja saat ini tidak terulang kembali. Tentunya pelaksanaan pemetaan dan pelatihan vokasi di atas memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Koordinasi antar kementerian lembaga menjadi penting dalam memastikan bahwa tenaga kerja yang hadir saat ini merupakan tenaga kerja yang berkualitas terampil dan kompeten.

Pemanfaatan Bonus Demografi: Belajar dari Negara Lain

Keberhasilan suatu negara dalam mengelola kelompok usia produktif bergantung pada kemampuan negara tersebut mempersiapkan generasinya agar dapat memanfaatkan celah kesempatan (*window of opportunity*) dari bonus demografi. Tidak semua negara berhasil memanfaatkan bonus demografi. Jepang adalah salah satu yang sukses, namun Brazil dan Afrika Selatan dinilai gagal. Indonesia sebaiknya belajar dari kegagalan Brasil dan Afrika Selatan dalam mengkapitalisasi peluang bonus demografi. Periode bonus demografi di Brasil dimulai awal 1970-an dan berakhir pada 2018 yang lalu. Brazil dianggap “gagal” mempersiapkan diri sejak awal periode bonus demografi dimulai. Resesi ekonomi yang terjadi di Brazil telah banyak mempengaruhi sektor formal sehingga pemerintah lebih memprioritaskan alokasi sumber daya untuk kebutuhan jaring pengaman sosial dan pensiun. Hal tersebut mengakibatkan defisit anggaran yang sangat besar sehingga Brazil tidak mampu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk penyediaan akses pendidikan yang berkualitas, infrastruktur, kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Sedangkan untuk kasus Afrika Selatan, permasalahan utama terkait tingginya angka pengangguran. Terjadi diskoneksi antara tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak bisa diimbangi oleh tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Hal ini akibat adanya *skill mismatch* antara apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja dengan apa yang bisa ditawarkan oleh pekerja. *Mismatch* yang ada disebabkan karena kualitas pendidikan yang kurang baik dan kegagalan pemerintah meng-*link*-an antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kondisi yang terjadi mengakibatkan sekitar 53 persen generasi milenial di Afrika Selatan menganggur karena tidak terserap pasar tenaga kerja.

Selain Jepang, China dan Korea Selatan (Korsel) juga dinilai berhasil dalam memanfaatkan kondisi bonus demografinya. Keberhasilan China, dapat dilihat dari penciptaan industri rumah tangga yang memproduksi

berbagai komponen-komponen peralatan elektronika sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas di negeri tirai bambu tersebut. Sedangkan Korsel berhasil mengarahkan industri-industri rumah tangganya untuk membuat komponen telepon genggam. Industri komponen tersebut menyuplai pabrik perakitan telepon genggam sehingga struktur industrinya saling melengkapi dan merata. Hal ini dapat terjadi di Indonesia jika pemahaman akan kekuatan industri dipahami dan kemudian pemetaan industri dan tenaga kerja dilakukan sehingga tercipta profesi yang saling melengkapi struktur industri tersebut.

Rekomendasi

Hadirnya pandemi Covid-19 membuat pemerintah perlu melakukan kalibrasi dengan pemetaan di sektor ketenagakerjaannya, terutama kebijakan yang diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Kalibrasi kebijakan tersebut dapat dilakukan sejalan dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang ada saat ini. Kebijakan pemetaan tersebut berupa: 1) pemetaan industri dan tenaga kerja yang terdampak Covid-19; 2) pemetaan jenis pekerjaan yang hilang dan baru muncul akibat dinamika yang terjadi selama pandemi; 3) pemetaan peluang digitalisasi usaha untuk perluasan kesempatan kerja mengingat dengan adanya kebijakan *physical distancing* yang masih berjalan hingga kini, adanya digitalisasi di berbagai lini kehidupan merupakan solusi yang memudahkan pekerjaan; 4) pemetaan sektor industri prioritas pasca Covid-19. Pemetaan tersebut dapat juga menjadi dasar dalam perencanaan ketenagakerjaan ke depan agar tenaga kerja yang tidak terserap lapangan kerja makin berkurang.

Selain pemetaan untuk perencanaan ketenagakerjaan ke depan, digitalisasi pelatihan vokasi juga perlu dilakukan sehingga mampu menjangkau peserta lebih banyak dan menghasilkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil dalam waktu singkat dan masif. Pelatihan vokasi digital juga perlu didampingi pelatihan di luar jaringan untuk memastikan peserta pelatihan mampu mempraktekkan keahlian yang telah dipelajari. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah, namun juga perlu ditekankan kualitas pelatihan vokasi tersebut. Selain itu, pelaksanaan pemetaan dan pelatihan vokasi di atas memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Koordinasi antar kementerian lembaga menjadi penting dalam memastikan bahwa tenaga kerja yang hadir saat ini merupakan tenaga kerja yang berkualitas terampil dan kompeten.

Daftar Pustaka

- Asian Productivity Organization. 2019. APO Productivity Databook 2019. ISBN : 978-92-833-2487-4
- BPS. 2020. Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2020. ISSN : 1979-7702
- _____. 2020. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2020. ISSN : 0126-647x
- _____. 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015. ISBN : 978-602-438-189-9
- _____. 2020. Statistik Indonesia 2020. ISSN : 0126-2912
- DPR. 2020. Bahan Paparan Dirut BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek. Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, 26 Agustus 2020
- Detik.com. 2015. RI Perlu Belajar dari China dan Korsel Soal Bonus Demografi. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2952133/ri-perlu-belajar-dari-china-dan-korsel-soal-bonus-demografi>
- Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan dan RAPBN 2021
- Kementerian Ketenagakerjaan. 2020. Tatanan Kenormalan Baru Ketenagakerjaan dan Upaya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. Bahan paparan yang disampaikan dalam Webinar New Normal Ketenagakerjaan Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional tanggal 5 Agustus 2020.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Strategi Penanggulangan Peningkatan Pengangguran dan Pemulihan Ekonomi Nasional: Perspektif Makroekonomi dan Jangka Menengah. Bahan paparan yang disampaikan dalam

Webinar Dampak COVID-19 Terhadap Ketenagakerjaan: Merancang Strategi Pemulihan Perekonomian Indonesia oleh The Smeru Institute tanggal 10 Juli 2020

Kompas.com. 2020. Dibuka Hari Ini, Berikut Sejumlah Hal yang Perlu Diketahui soal Kartu Prakerja. Diakses dari

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/08/153912865/dibuka-hari-ini-berikut-sejumlah-hal-yang-perlu-diketahui-soal-kartu?page=all>

Liputan6.com. 2019. Produktivitas Pekerja Indonesia di Asia Urutan Berapa?. Diakses dari

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4099018/produktivitas-pekerja-indonesia-di-asia-urutan-berapa>

Ngadi. 2020. Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Diakses dari

<http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap--tenaga-kerja-indonesia/22030>

Ngadi. 2020. Hasil Survei Dampak Pandemi Covid-19 pada Pekerja. Diakses dari

<http://lipi.go.id/siaranpress/hasil-survei-dampak-pandemi-covid-19-pada-pekerja/22011>

Okezone.com. 2020. Bonus Demografi, RI Perlu Belajar dari Jepang. Diakses dari

<https://economy.okezone.com/read/2020/02/16/320/2169342/bonus-demografi-ri-perlu-belajar-dari-jepang?page=2>

Purba, Yanti Astrelina & Aini, Yulinda Nurul . 2020. Nasib Angkatan Kerja Muda di Tengah Hantaman COVID-19. Diakses dari

<https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatat-covid19/1010-nasib-angkatan-kerja-muda-di-tengah-hantaman-covid-19>

Tim COVID-19 Tenaga Kerja LIPI. 2020. Dampak Darurat Virus Corona terhadap Buruh/Karyawan, 1 May 2020.

[Online]. Diakses dari https://www.instagram.com/p/B_pg-ttDIZ7/?utm_source=ig_web_copy_link

Triyonggo, Yunus, 2020. Menuju Pemanfaatan Bonus Demografi: Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Pemulihannya. Bahan paparan diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anggaran, Setjen dan BK DPR RI tanggal 28 Agustus 2020

UN Population Division. 2003. World Population Prospects: The 2002 Revision. Diakses dari

<http://pratlif.com/demography/un/WPP2002-HIGHLIGHTSrev1.PDF>



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id